

Materi Sesi I

Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu politik sering disebut sebagai pengetahuan yang tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Namun jika ilmu politik dilihat sebagai bagian dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian, dan cakupan yang jelas dan terinci, ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Dalam perkembangannya, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu hukum, sosiologi, dan psikologi.

Ketika perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, pusat perhatian utama adalah negara, dikenal sebagai tradisi yuridis formal. Tradisi yuridis formal ini mempengaruhi kajian ilmu politik Indonesia. Sedangkan perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat dipengaruhi oleh spektrum yang lebih luas dan berpijak pada ide rasionalitas Yunani; ide yuridis Romawi; ide kenegaraan Jerman; ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan kenegaraan dari Jerman; ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan yang berasal dari Inggris dan Perancis.

Ketidakpuasaan sarjana-sarjana Amerika terhadap pendekatan yuridis menyebabkan mereka berpaling pada pengumpulan fakta-fakta empirik. Pendekatan empiric berkembang di Amerika Serikat ketika orang mulai menyadari akan perlunya asas-asas baru untuk menjelaskan tingkah laku manusia. Hal ini menyebabkan psikologi memperoleh perhatian luas dari para sarjana. William James dan John Dewey memberikan sumbangan ilmu psikologi kepada ilmu politik yang dikenal sebagai pendekatan perilaku.

Bidang Kajian Ilmu Politik

Jika membandingkan empat bidang kajian utama ilmu politik yang diterbitkan UNESCO tahun 1950 dan empat bidang kajian utama ilmu politik menurut Andrew Heywood (1997), maka pada ilmu politik didapatkan banyak perubahan dalam studi ilmu politik yang bergerak meluas dari pendekatan institusional klasik yang terfokus pada studi institusi-institusi klasik pemerintahan dan partai politik ke arah yang lebih banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Seiring perkembangan studi-studi teori politik kontemporer, pendekatan-pendekatan baru dalam menganalisis institusi khas politik, maka bidang kajian ilmu politik terdiri dari:

1. Teori politik merupakan bahasan sistematika dan generalisasi dari gejala politik; bersifat spekulatif, deskriptif atau komparatif.
2. Lembaga-lembaga politik, mempelajari kinerja pemerintah berikut para aparatnya yang secara teknis merupakan tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Lebih banyak menggunakan konsep-konsep sosiologi dan psikologi, sering menonjolkan aspek dinamika politik tingkat massa.
4. Hubungan internasional, berkembang menjadi kajian tersendiri.

Munculnya studi pembangunan politik (*Political Development*) menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat, khususnya terkait pengaruh lembaga politik terhadap perubahan di masyarakat.

Definisi Ilmu Politik

Politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup (Heywood). Pembuatan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik beserta pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan umum, pengaturan, pembagian, alokasi sumber daya yang ada, diperlukan kekuasaan dan wewenang (*authority*) untuk membina kerja sama atau menyelesaikan konflik. Dalam tradisi politik digunakan cara-cara meyakinkan (*persuasi*) dan cara-cara kekerasan (*kohefif*).

Definisi ilmu politik melibatkan aspek-aspek:

1. Negara, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan si pelaku.
3. Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, sebagai konsep pokok ilmu politik pengambilan keputusan melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ruang lingkup keputusan dapat terbatas pada penentuan tujuan masyarakat dan dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan (*policy*) merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pihak pembuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
4. Kompromi dan konsensus, politik dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik (resolusi konflik) melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan/aplikasi kekuasaan secara nyata; dianggap sebagai kekuatan penuntun menuju peradaban yang menjauhkan masyarakat dari pertumpahan darah.
5. Pembagian dan alokasi, yaitu pembagian (*distribution*) dan penjabatan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

Menurut Harold D Laswell politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sedangkan definisi menurut David Easton sistem politik adalah keseluruhan interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara *otoritatif* (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat.

Daftar Pustaka

Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu Politik. Universitas Terbuka